

**KERJASAMA PENGELOLAAN
TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH
BANTARGEBAH ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DKI
JAKARTA DENGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar
Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas*

Oleh:

**Rio Haryadi
BP. 03193051**



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

ABSTRAK

Rio Haryadi, Skripsi, Kerjasama Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Bantargebang antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. 109 halaman, 10 buku, 1 laporan penelitian, 1 Undang – undang, 14 artikel internet, dan 2 konsideran Perjanjian Kerjasama.

Wilayah perkotaan seperti Jakarta tidak bisa mengatur kehidupannya sendiri, melainkan harus ada kerjasama dengan wilayah lain. Contoh kerjasama yang dilakukan adalah dengan Kota Bekasi dalam bidang penyediaan lahan untuk TPA sampah Jakarta. Wilayah Bantargebang akhirnya dipilih untuk lokasi TPA sebagai hasil rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lahan Bantargebang dipilih setelah rusak parah akibat penggalian yang dilakukan untuk kepentingan Jakarta. Kerjasama tersebut berjalan setelah rekomendasi diberikan dan pembangunan TPA Bantargebang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebelum pembangunan TPA Bantargebang, masyarakat sekitar mendapat sosialisasi berkaitan dengan pembangunan TPA di sekitar tempat tinggal mereka. Setelah reformasi, masyarakat mulai mengajukan penolakan terkait keberadaan TPA Bantargebang. Penolakan tersebut berdampak pada pengelolaan sampah di Jakarta. Akhirnya penolakan tersebut berhasil diredam dengan beberapa tuntutan dari masyarakat. Tuntutan pertama yang dikabulkan adalah adanya Perjanjian Kerjasama antara pemerintah daerah dengan dibuatkannya konsideran kerjasama. Melalui perjanjian kerjasama tersebut dilibatkanlah pihak swasta dalam pengelolaan TPA Bantargebang dan pembayaran kompensasi kepada masyarakat. Keterlibatan pihak swasta tidak bertahan lama dan akhirnya kembali diambil alih oleh Dinas Kebersihan Provinsi Jakarta. Kerjasama dalam pengelolaan TPA Bantargebang, berubah dari keadaan tidak seimbang menjadi seimbang karena kebutuhan masing – masing pihak akan sumber daya tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data digunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Untuk triangulasi data teknik yang dilakukan adalah dengan saling mengkonfrontir data yang didapatkan. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan unit analisis lembaga.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah setiap daerah tidak bisa menghidupi dirinya sendiri dan harus bekerjasama dengan daerah lain. Untuk memperlancar kerjasama setiap daerah harus saling diuntungkan, sebagai contoh Jakarta bisa mengelola sampahnya dengan baik sementara Kota Bekasi mendapatkan dana kompensasi dari kerjasama tersebut.

Saran dari penelitian ini adalah mempersiapkan secara matang kerjasama yang akan dilakukan, memberdayakan sumber daya manusia lokal, dan pembagian keuntungan secara materil dan non-materil.

Kata kunci : kerjasama, pengelolaan, Tempat Pembuangan Akhir, Pemprov DKI Jakarta, Pemko Bekasi, penolakan, tuntutan, kompensasi.

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Sampah merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di satu sisi, produksi sampah yang dihasilkan semakin meningkat, sementara di sisi lain lahan untuk pembuangan atau pengolahan sampah semakin tidak tersedia. Tidak bisa dipungkiri sampah kota yang dihasilkan setiap harinya membutuhkan perlakuan khusus. Jika dipandang sebelah mata, permasalahan sampah akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Artinya, harus ada standarisasi baku dalam pengelolaannya karena jika tidak maka akan menimbulkan berbagai masalah, seperti pencemaran lingkungan, terganggunya kesehatan masyarakat, sampai pada perubahan fungsi lahan.

Secara umum, pengelolaan sampah dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu cara konvensional dan cara modern. Cara konvensional masih menggunakan cara yang sangat sederhana, seperti diletakkan begitu saja di sebuah lahan terbuka atau dibakar, sedangkan cara modern sudah melibatkan teknologi yang lebih baik. Di negara maju, sampah telah menjadi salah satu energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, sampah tidak akan menjadi masalah bagi pemerintah. Contoh pengelolaan sampah dengan cara modern bisa kita temukan di beberapa negara maju. Seperti di Belanda, pengelolaan sampah yang dilakukan secara modern ternyata bisa dijadikan energi alternatif. Seperti halnya di Belanda, Jerman juga melakukan hal yang sama dengan pengelolaan sampah dengan cara modern. Sampah – sampah di Jerman dikelola dengan baik

oleh perusahaan – perusahaan tertentu dan menghasilkan bahan lain yang berguna dari pengolahan sampah tersebut¹.

Pengelolaan sampah di Jakarta dapat dikategorikan masih konvensional bahkan tergolong masih primitif. Diantara sistem yang digunakan yaitu *open dumping*, sistem ini bekerja dengan cara meletakkan sampah di lokasi pembuangan, selanjutnya para pemulung yang akan memisahkan sampah yang dapat didaur ulang dengan yang tidak dapat didaur ulang dengan mekanisme tersendiri yang terpisah dari campur tangan pemerintah.

Open dumping, di berbagai kasus di Indonesia, baik di tempat pembuangan sementara atau tempat pembuangan akhir sampah, tentunya akan merugikan masyarakat setempat yang harus menanggung segala resiko akibat dari sistem tersebut. Resikonya adalah pencemaran baik tanah, air, maupun udara yang menjadi efek negatif akibat penumpukan sampah yang jumlahnya setiap hari terus bertambah. Sampah akan datang dalam bentuk beragam dan belum mendapatkan perlakuan khusus. Sampah kota bisa dalam berbagai bentuk, organik atau non – organik. Pemerintah sudah melakukan langkah kongkrit untuk memisahkan kedua sampah tersebut dengan menyediakan tempat sampah terpisah, hanya saja terkendala pada tataran pelaksanaan di masyarakat dan proses pembuangan yang kembali disatukan, sehingga usaha tersebut terkesan tidak berarti apa – apa.

Cara pembuangan sampah dengan metode konvensional seperti ini menimbulkan masalah laten. Seperti yang terjadi di tempat pembuangan akhir

¹ http://www.cybermq.com/cybermq/detail_artikel.php?id=277&noid=3 tanggal akses 19 Desember 2006

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Tidak ada daerah yang mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Usaha pemenuhan kebutuhan daerah ini juga dipengaruhi oleh bertambahnya penduduk yang menempati daerah tertentu. Hal inilah yang dialami Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan warganya, seperti pengadaan tempat tinggal dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengelolaan sampah dari warga Jakarta. Masalah sampah ini coba diselesaikan dengan melakukan kerjasama penyediaan lahan yang akan digunakan sebagai TPA. Untuk itu dilakukanlah kerjasama dengan daerah satelit sekitar Jakarta akhirnya terpilihlah Kota Bekasi dengan lahan Bantargebang yang dimilikinya.

Setelah mengalami perjalanan panjang kerjasama tersebut baru bisa mendapatkan bentuk terbaik, jika tidak ingin mengatakannya sempurna. Begitu yang dialami oleh perjanjian kerjasama pengelolaan TPA Bantargebang antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemko Bekasi. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua Pemerintah Daerah tersebut juga pernah mengalami perubahan baik dari kondisi kerjasama yang dipengaruhi oleh peristiwa – peristiwa yang terkait kerjasama tersebut hingga mengalami kondisi terbaik dimana kedua Pemerintah Daerah merasa diuntungkan.

Saling membutuhkan sumber daya satu sama lain adalah alasan kuat dalam mempertahankan kerjasama ini. Jakarta memiliki sampah yang harus dikelola dengan baik dan sumber dana yang bisa digunakan untuk memberi kompensasi

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Faisal, Sanapiah. 2003. *Format - Format Penelitian Sosial*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- J Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosda Karya
- Jimung, Martiji. 2005. *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Yayasan Pustaka Nusantara
- Komarudin. 1999. *Pembangunan Perkotaan Berbasis Lingkungan*, Jakarta. Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi BPPT
- Nurmandi, Achmad. 2006. *Manajemen - Perkotaan : Aktor, Organisasi, Pengelolaan Daerah Perkotaan dan Metropolitan di Indonesia (edisi revisi)*. Yogyakarta. Sinergi Publishing kerjasama dengan Laboratorium Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Publik FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Sabari Yunus, Hadi. 2005 *Manajemen Kota : Perspektif Spasial*. Jogjakarta. Pustaka Pelajar
- Soegijoko, Budi Tjahjati Sugiyanto, dkk., (eds.). 2005. *Bunga Rampai : Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21 Buku 2 : Pengalaman*